BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan

PT.TELKOM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa Telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Pada awalnnya bernama "Post En Telegraafdienst" yang didirikan pada tahun 1884 dengan staatblad no.52 kemudian pada tahun 1906 diubah menjadi "Post Telegraaf en Telefoondienst" (PTT) dengan staatsblad no.395 dan semenjak itu disebut PTT-Dients. Tahun 1931 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. Selanjutnya pada tahun 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.19 tahun 1960, tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara, ternyata PTT memenuhi syarat untuk tetap menjadi Perusahaan Negara (PN) dan dengan PERPU No.240 tahun 1961 berubah menjadi PN.POS dan TELEKOMUNIKASI.

Lapangan usaha PN.POS dan TELEKOMUNIKASI ternyata berkembang dengan pesat, maka pada tahun 1965, Pemerintah mengadakan peninjauan kembali. Hasilnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (P.P. No.29 dan 30 tahun 1965) dan terjadi pemecahan menjadi P.N. POS DAN GIRO dan PN.TELEKOMUNIKASI berubah menjadi PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI yang disingkat dengan PERUMTEL. Keberadaan PERUMTEL dikukuhkan dengan Peraturan

Pemerintah No.36 tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan luar negeri.

Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan membeli seluruh saham PT.INDOSAT sebuah perusahaan swasta yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah statusnya menjadi suatu BUMN berbentuk PERSERO. Pernyataan modal negara Republik Indonesia dalam saham PT.INDOSAT tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.52 tahun 1980.

Tahun 1980 diadakan perubahan atas peraturan pemerintah No.22 tahun 1974, yakni dengan menetapkan PERUMTEL sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri dan PT.INDOSAT sebagai badan usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum internasional. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974 tentang PERUMTEL juga diubah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.54 tahun 1980.

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan pemerintah No.3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan PERJAN, PERUM dan PERSERO, diterbitkan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1984 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1970 Jo. Peraturan pemerintah No.54 tahun 1980.

Suatu hal yang juga sangat menggembirakan dalam sejarah perundang-undangan ini adalah ditetapkannya Undang-undang No.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang memberikan angin segar dalam pengembangan dan pembangunan pertelekomunikasian di Indonesia.

Mengingat perkembangan demikian pesat ditambah dengan pola manajemen yang lebih terbuka, pemerintah melalui peraturan pemerintah No.25 tahun 1991 tepatnya tanggal 1 mei 1991 menetapkan Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum), lalu Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peralihan bentuk perusahaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia oleh *Notaris Imas Fatimah, SH* bersama-sama dengan *Memparpostel Soesilo Soedarman* yang bertindak selaku kuasa dari Menteri Keuangan sebagai pemegang saham, pada hari selasa tanggal 24 september 1991 jam 09.30WIB di Depparpostel, jalan Kebon Sirih No.36 Jakarta Pusat.

Anggaran dasar telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.5, tanggal 17 januari 1992, Tambahan Berita Negara RI No.210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.7, tanggal 23 januari 1998, Tambahan Berita negara RI no.556, berkedudukan di jalan japati No.1 Bandung.

Dan PT.Telkom membawahi beberapa Divisi, antara lain yaitu :

- Divisi Regional I (Divre I) yang berpusat di Medan untuk wilayah Sumatera.
- Divisi Regional II (Divre II) yang berpusat di Jakarta untuk Jabotabek, Serang, Purwakarta dan Bogor.
- Divisi Regional III (Divre III) yang berpusat di Bandung untuk Jawa Barat.
- Divisi Regional IV (Divre IV) yang berpusat di Semarang untuk jawa Tengah.

- Divisi Regional V (Divre V) yang berpusat di Surabaya untuk Jawa Timur.
- Divisi Regional VI (Divre VI) yang berpusat di Balikpapan untuk Kalimantan.
- Divisi Regional VII (Divre VII) yang berpusat di Ujung Pandang untuk Sulawesi, Maluku, Irian, Bali, NTT dan NTB.
- Divisi Network (Divnet) berpusat di Bandung.
- Divisi Pelatihan (Divlat) berpusat di Bandung.
- Divisi Riset Teknologi Informasi (DIVRISTI) berpusat di Bandung.
- Divisi Properti berpusat di Bandung.
- Divisi Anelir berpusat di Bandung.
- Divisi SISFO berpusat di Bandung.
- Divisi Pembangunan berpusat di Bandung.
- Divisi MultiMedia berpusat di Jakarta.

Sedangkan penulis mengadakan Kerja Praktek di Divisi Long Distance dan sekarang berubah menjadi RO.Bandung dibagian server atau di CRMC yang berada di Jalan Supratman No.66 Bandung.

2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Merupakan BUMN dalam sebuah instansi Telekomunikasi yang berada di jalan Supratman No.66 Bandung.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No.25 tahun 1991 pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) status PERUMTEL diubah Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 25 tahun 1991 disebutkan bahwa dengan dialihkannya bentuk PERUMTEL menjadi Perusahaan Perseroan. PERUMTEL dinyatakan bubar pada pendirian Perusahaan Perseroan tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban kekayaan serta karyawan PERUMTEL yang ada saat pembubarannya beralih sepenuhnya kepada Perusahaan Perseroan yang bersangkutan.

2.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991 Juncto Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1991 maka bidang pekerjaan yang ada di PT TELKOM adalah badan penyelenggara jasa Telekomunikasi dalam negeri di Indonesia.

2.5. Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen Tempat Kerja Praktek

Bidang pekerjaan divisi/departemen tempat kerja praktek yaitu memperbaiki, memelihara, dan menangani server perusahaan mulai dari kerusakan server sampai kepada data-data yang ada pada server tersebut.

2.6. Struktur Organisasi Perusahaan

